

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **A. Akuntansi Sektor Publik**

##### **1. Pengertian Akuntansi Sektor Publik**

Pengertian sektor publik sangat luas karena masing-masing disiplin ilmu mempunyai definisi sendiri. Dari sudut pandang ilmu ekonomi, sektor publik sering didefinisikan sebagai suatu entitas yang aktivitasnya berhubungan dengan penyediaan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan dan hak publik. Sektor publik disebut juga bidang yang membicarakan metode manajemen negara.<sup>1</sup> Adapun ciri-ciri dari sektor publik yaitu 1) Dijalankan tidak untuk mencari keuntungan finansial, 2) Dimiliki secara kolektif oleh publik, 3) kepemilikan atas sumber daya tidak digambarkan dalam bentuk saham yang dapat diperjualbelikan, 4) Keputusan yang terkait dengan kebijakan maupun operasi didasarkan pada konsensus, kalau organisasi pemerintah melalui suatu badan legislatif.

Sedangkan pengertian akuntansi publik adalah suatu bidang kegiatan yang dilakukan oleh para akuntan publik yang menyediakan berbagai macam jasa untuk membantu perusahaan yang antara lain berupa jasa perpajakan, jasa auditing atau pemeriksaan atas kewajaran

---

<sup>1</sup> Monika Handayani, *Akuntansi Sektor Publik*, (Banjarmasin: Poliban Press, 2019), hal. 2

laporan keuangan, dan jasa konsultasi manajemen.<sup>2</sup> Berbagai jasa yang diberikan oleh akuntan public tersebut memunculkan bidang-bidang spesialisasi dalam akuntansi yaitu akuntansi perpajakan, pemeriksaan akuntansi dan jasa konsultasi manajemen.

Setelah mengetahui definisi dari akuntansi sektor publik, maka perlu diketahui tujuan dari akuntansi sektor publik menurut *American Accounting Association* (AAA) adalah sebagai berikut:<sup>3</sup>

- a. Memberikan informasi yang diperlukan untuk mengelola secara tepat, efisien dan ekonomis atas alokasi suatu sumber daya yang dipercayakan kepada organisasi. Tujuan ini terkait dengan pengendalian manajemen.
- b. Memberikan informasi yang memungkinkan bagi manajer untuk melaporkan pelaksanaan tanggungjawab secara tepat dan efektif program dan penggunaan sumberdaya yang menjadi wewenang dan memungkinkan bagi pegawai pemerintah dan penggunaan dan publik. Tujuan ini terkait dengan akuntabilitas.

American Accounting Association (AAA) merupakan sebuah organisasi professional untuk akademisi akuntan di Amerika Serikat. Berdiri pada tahun 1916 merupakan organisasi nirlaba yang terdiri dari individu yang terkait dalam pendidikan dan penelitian bidang akuntansi.

---

<sup>2</sup> Rita Eni Purwanti dan Indah Nugraheni, *Siklus Akuntansi*, (Yogyakarta: Kanisius, 2001), hal. 7

<sup>3</sup> V. Wiratna Sujarweni, *Akuntansi Sektor Publik*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2015), hal. 2

## 2. Penerapan Akuntansi Sektor Publik di Indonesia

Di Indonesia, akuntansi sektor publik awal kemerdekaan 17 Agustus 1945 belum banyak berkembang. Menurut catatan sejarah penerapan akuntansi sektor publik awalnya adalah pembuatan neraca kekayaan negara yang dikeluarkan pada tahun 1948. Bentuk laporan keuangan ini masih dalam bahasa dan mata uang Belanda.<sup>4</sup>

Pada era pemerintahan orde lama sekitar tahun 1950an, sektor public berperan besar dalam pembuatan dan pelaksanaan strategi pembangunan Indonesia. Dengan adanya akuntansi sektor publik yang terkait dengan manajemen ekonomi makro membantu pencatatan rencana pembangunan dan pelaksanaan pembangunan negara. Selain itu, penerapan akuntansi sektor publik di Indonesia adalah BUMN. Pada tahun 1959 pemerintah orde lama memulai membuat kebijakan yaitu nasionalisasi perusahaan asing yang ditransformasi menjadi Badan Usaha Milik Negara (BUMN), contohnya adalah perusahaan telekomunikasi. Selanjutnya sumbangan sektor publik dapat digunakan sebagai alat pantau pembangunan nasional dan stabilitas publik, sejak saat itulah akuntansi sektor publik di Indonesia semakin berkembang.

Terdapat 4 prinsip dasar pengelolaan keuangan negara yang telah dirumuskan dalam undang-undang bidang keuangan negara yaitu:

- a. Akuntabilitas (pertanggungjawaban dari pemegang manajemen organisasi untuk memberikan informasi tentang segala aktivitas dan

---

<sup>4</sup> *Ibid.*, hal. 15

kegiatan organisasi kepada pihak pemilik organisasi) berdasarkan hasil taua kinerja.

- b. Keterbukaan dalam setiap transaksi pemerintah.
- c. Pemberdayaan manajer professional
- d. Adanya lembaga pemeriksaan eksternal yang kuat, professional, dan mandiri serta dihindarinya duplikasi dalam pelaksanaan pemeriksaan.

Perkembangan akuntansi sektor publik di Indonesia saat ini adalah adanya pelaksanaan otonomi daerah (hak tiap daerah untuk mengatur rumah tangga sendiri) dan desentralisasi (pendelgasian wewenang). Saat ini desentralisasi tidak hanya berarti pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat ke pemerintahan daerah, namun juga berlaku pelimpahan wewenang dari pemerintah kepada pihak swasta dengan privatisasi (pelibatan modal swasta dalam struktur modal perusahaan publik).

### **3. Anggaran Sektor Publik**

- a. Pengertian Anggaran Sektor Publik

Anggaran sektor publik adalah pertanggungjawaban dari pemegang manajemen organisasi untuk memberikan informasi tentang segala aktivitas dan kegiatan organisasi kepada pihak pemilik organisasi atas pengelolaan dana publik dan pelaksanaan berupa rencana-rencana program yang dibiayai dengan uang publik.

Akuntansi manajemen sektor publik salah satunya berperan sebagai pemberi fasilitas terciptanya anggaran.<sup>5</sup>

Isi dari anggaran adalah rencana kegiatan dalam suatu periode yang direpresentasikan dalam bentuk rencana pendapatan dan belanja dalam suatu moneter. Anggaran itu berbentuk suatu dokumen yang menggambarkan kondisi keuangan dari suatu organisasi sektor publik yang meliputi informasi mengenai pendapatan, belanja dan aktivitas. Anggaran berisi estimasi mengenai apa yang akan dilakukan organisasi dimasa yang akan datang.

b. Proses Penyusunan Anggaran Sektor Publik

Penyusunan anggaran dan pelaksanaan anggaran dilakukan dalam satu periode dan merupakan satu rangkaian proses yang saling berkaitan. Adapaun proses penyusunan anggaran mempunyai 4 (empat) tujuan:

- 1) Untuk memberikan bantuan pada organisasi sektor publik agar dapat mencapai tujuan dan meningkatkan koordinasi antara bagian dalam lingkungan.
- 2) Untuk membantu menciptakan efesiensi, efektifitas dan asas keadilan dalam menyediakan barang dan jasa publik melalui proses prioritas.
- 3) Memungkinkan pemerintah untuk memenuhi prioritas belanja.

---

<sup>5</sup> *Ibid.*, hal. 28

- 4) Meningkatkan transparansi dan pertanggungjawaban pemegang manajemen organisasi sektor publik.

Faktor-faktor dominan yang terdapat dalam proses penganggaran adalah:

- 1) Tujuan dan target yang akan diraih
- 2) Pemilik sumber daya
- 3) Waktu yang dibutuhkan untuk meraih tujuan dan target
- 4) Faktor lain yang mempengaruhi anggaran seperti peraturan baru, inflasi, fluktuasi pasar, bencana alam dan lain sebagainya.

## **B. Akuntansi Pemerintahan Desa**

### **1. Pengertian Akuntansi**

Akuntansi merupakan seni dalam mengukur, berkomunikasi, dan menginterpretasikan aktivitas keuangan. Secara luas, akuntansi juga dikenal sebagai bahasa bisnis. Selain itu akuntansi juga dapat dipahami suatu proses pengukuran atau pemberian kepastian mengenai informasi yang akan membantu manajer, investor, otoritas pajak dan pembuat keputusan lain untuk membuat alokasi sumber daya didalam perusahaan, organisasi dan lembaga pemerintah.<sup>6</sup>

Akuntansi bertujuan untuk menyiapkan suatu laporan keuangan yang akurat agar dapat dimanfaatkan oleh para manajer, pengambilan kebijakan dan pihak berkepentingan lainnya, seperti pemegang saham, kreditur, atau

---

<sup>6</sup> Lantip Susilowati, *Akuntansi Sederhana untuk Usaha Jasa dan Dagang...*, hal. 1

pemilik. Pencatatan harian yang terlibat dalam proses ini dikenal dengan istilah pembukuan. Akuntansi keuangan adalah suatu cabang dari akuntansi dimana informasi keuangan pada suatu bisnis dicatat, diklasifikasi, diringkas, diinterpretasikan, dan dikomunikasikan. Akuntansi dikaitkan dengan dengan kebutuhan mereka dalam bisnis untuk menyimpan catatan transaksi mereka, cara dimana mereka menginvestasikan kekayaan mereka dan utang kepada mereka dan dengan mereka

Akuntansi sering dijuluki sebagai bahasa bisnis (*the language of business*). Menurut definisi dari *American Accounting Association* akuntansi adalah proses mengidentifikasi, mengukur, dan melaporkan informasi ekonomi untuk membuat pertimbangan dan mengambil keputusan yang tepat bagi pemakai informasi tersebut. Akuntansi pemerintahan bisa disebut juga akuntansi yang bersangkutan dengan bidang keuangan negara, dari anggaran sampai dengan pelaksanaan dan pelaporannya, termasuk segala pengaruh yang ditimbulkannya.

Peran akuntansi yaitu menyajikan informasi keuangan secara kuantitatif dan relevan kepada pihak-pihak yang berkepentingan (pemakai informasi tersebut) dalam pengambilan keputusan ekonomi, baik dalam mengukur keberhasilan operasi perusahaan, maupun membuat rencana dimasa yang akan datang.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> H. Lili M. Sadeli, *Dasar-dasar Akuntansi*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2008), hal. 2

## 2. Akuntansi Pemerintah

Akuntansi pemerintah merupakan proses penyusunan laporan keuangan pemerintah. Sebagaimana bidang akuntansi yang lain, siklus akuntansi yang terjadi pada dasarnya sama, dimulai dari suatu transaksi yang berkaitan dengan keuangan. Akan tetapi, akuntansi pemerintah memiliki karakteristik khusus, diantaranya lebih menekankan pada pencatatan pelaksanaan anggaran serta pelaporan rielisasinya. Hal tersebut menyebabkan akuntansi pemerintah disebut sebagai akuntansi anggaran.<sup>8</sup>

Persamaan dasar akuntansi merupakan konsep dasar dalam pencatatan transaksi berdasarkan sistem pembukuan ganda (*double entry system*). Sistem ini digunakan baik untuk mencatat transaksi yang melibatkan akun-akun neraca dan LO (asset, kewajiban, ekuitas pendapatan LO dan beban) maupun untuk mencatat transaksi akun-akun Laporan Realisasi Anggaran (pendapatan LRA, belanja, dan pembiayaan). Dengan demikian, laporan keuangan berupa LRA, LO, dan neraca dihasilkan melalui penjumlahan transaksi dengan mekanisme *double entry system*. Sistem pembukuan selanjutnya dapat dibagi ke dalam dua subsistem, yaitu:

### a. Subsistem akuntansi keuangan

Subsistem ini merupakan proses akuntansi (penjurnalan, posting, dan seterusnya) untuk mencatat transaksi dengan basis akrual yang akan menghasilkan LO dan neraca.

---

<sup>8</sup> Riyanto dan Puji Agus, *Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akrual*, (Yogyakarta : Pustaka Belajar, 2015), hal. 23

b. Subsistem akuntansi pelaksanaan anggaran

Subsistem ini merupakan proses akuntansi (penjurnalan, posting, dan seterusnya) untuk mencatat transaksi dengan basis akrual yang akan menghasilkan LRA.

Berdasarkan konsep *double entry*, setiap pengaruh transaksi yang dicatat akan selalu berada dalam suatu keseimbangan antara sisi kiri (debit) dan sisi kanan (kredit). Berikut akan digambarkan konsep persamaan akuntansi yang akan diturunkan ke dalam penjurnalan dengan mekanisme debit kredit.

**Persamaan Dasar Akuntansi**

$$\text{Aktiva} = \text{Pasiva}$$

$$\text{Aset} = \text{Kewajiban} + \text{Modal Pemilik}$$

$$\text{Aset} = \text{Hak Kreditur} + \text{Hak Residual Pemilik}$$

Berdasarkan persamaan dasar akuntansi tersebut di atas, dapat diturunkan sebuah persamaan akuntansi pemerintahan dengan berpedoman pada SAP berbasis akrual sebagai berikut :

**Persamaan Akuntansi Pemerintah**

$$\text{Aktiva} = \text{Pasiva}$$

$$\text{Aset} = \text{Kewajiban} + \text{Hak Ekuitas}$$

$$\text{Aset} = \text{Hak Pihak Ketiga} + \text{Hak Residual Pemerintah}$$

Walaupun berbasis akuntansi akrual, namun anggaran masih dalam basis kas. Oleh karena itu, anggaran memiliki persamaan akuntansi sendiri. Persamaan akuntansi tersebut dibutuhkan untuk mencatat penepatan perda APBD dan menutupnya pada akhir periode

Dalam proses akuntansi, transaksi akan dicatat pertama kali pada buku jurnal dengan menggunakan kaidah debit kredit. Suatu akun dikatakan debit berarti jumlah yang akan memengaruhi akun tersebut akan dicatat pada buku jurnal di kolom debit (kiri), dan suatu akun dikatakan kredit berarti jumlah yang akan memengaruhi akun tersebut akan dicatat pada jurnal di kolom kredit (kanan).

Suatu transaksi yang mengakibatkan bertambahnya asset akan dicatat dengan mendebet akun asset, sebaliknya jika transaksi mengakibatkan berkurangnya asset akan dicatat dengan mengkredit akun asset. Hal yang demikian berlaku pula untuk akun beban. Aturan sebaliknya berlaku untuk akun utang, ekuitas, dan pendapatan. Konsep ini dinamakan saldo normal.

Secara ringkas, kaidah debit kredit dan saldo normalnya masing-masing akun dalam pencatatan transaksi keuangan pemerintah untuk subsistem akuntansi finansial (transaksi yang berbasis akrual ) adalah sebagai berikut

**Tabel 2.1**  
**Kaidah Debet – Kredit, Saldo Normal**  
**Akuntansi Finansial (berbasis akrual)**

<b>AKUN</b>	<b>DEBET</b>	<b>KREDIT</b>	<b>SALDO NORMAL</b>
Aset	Tambah	Kurang	Debet
Kewajiban	Kurang	Tambah	Kredit
Ekuitas	Kurang	Tambah	Kredit
Pendapatan-LO	Kurang	Tambah	Kredit
Beban	Tambah	Kurang	Debet

*Sumber : akuntansi pemerintah daerah berbasis akrual*

Adapun kaidah debit kredit dan saldo normal masing-masing akun dalam pencatatan transaksi pelaksanaan APBD untuk subsistem akuntansi pelaksanaan anggaran (transaksi yang berbasis kas) adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.2**  
**Kaidah Debet – Kredit, Saldo Normal**  
**Pelaksanaan Anggaran (berbasis kas)**

AKUN	DEBET	KREDIT	SALDO NORMAL
Pendapatan-LRA	Kurang	Tambah	Kredit
Belanja	Tambah	Kurang	Debet
Penerimaan Pembiayaan	Kurang	Tambah	Kredit
Pengeluaran Pembiayaan	Tambah	Kurang	Debet

*Sumber : akuntansi pemerintah daerah berbasis akrual*

Untuk mencatat akun LRA secara *double entry*, menggunakan akun yaitu “Estimasi Perubahan SAL” sebagai lawan akun pendapatan-LRA, belanja, maupun pembiayaan.

Struktur hubungan entitas dalam akuntansi yang diimplementasikan pada pemerintah daerah adalah setruktur akuntansi HOBO (*Home Office and Branch Office*), yaitu kantor pusat dan kantor cabang. Pemerintah daerah sebagai entitas pelaporan diperlakukan sebagai kantor pusat (*home office*). Sedangkan, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) diperlukan sebagai kantor cabang (*branch office*). Namun demikian, untuk lingkungan pemerintah konsep HOBO ini lebih tepat untuk menggambarkan hubungan transaksi antara Pejabat Penatausahaan Keuangan Daerah (PPKD) dengan SKPD, dibandingkan dengan struktur hubungan induk dan anak. Hal ini didasari oleh beberapa pertimbangan :

- a) PPKD-SKPD bukan entitas yang masing-masing berdiri sendiri, melainkan suatu kesatuan.
- b) Antara PPKD dan SKPD tidak terjadi *transfer income* (dalam pengertian profit).
- c) SKPD dimiliki 100% oleh pemerintah daerah.

Transaksi antara PPKD dan SKPD dicatat menggunakan akun resiprokal, yaitu RK PPKD dan RK SKPD. Akun RK PPKD adalah akun yang digunakan oleh SKPD, disajikan pada neraca SKPD sebagai ekuitas. Hal ini menggambarkan besarnya hak residual pemerintah daerah yang terdapat pada SKPD. Sedangkan akun RK SKPD adalah akun yang digunakan oleh PPKD, disajikan pada neraca PPKD sebagai asset. Hal ini menggambarkan besarnya asset PPKD yang terdapat pada SKPD.

### **3. Akuntansi Desa**

Pemerintah desa merupakan lembaga perpanjangan pemerintah pusat yang memiliki peran strategis untuk mengatur masyarakat yang ada di pedesaan demi mewujudkan pembangunan pemerintah. Akuntansi di lingkungan desa hadir sebagai sebuah reformasi di bidang keuangan, akibat dari adanya paradigma sistem pemerintahan dan tuntutan masyarakat akan terlaksananya *good governance*. Oleh karena itu, hal ini pun nyatanya memberikan dampak terhadap adanya desentralisasi kewenangan dan desentralisasi fiskal yang mengarah pada desa, untuk dapat secara mandiri mengelola keuangan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Untuk

itu, desentralisasi yang diberikan ini menyebabkan diperlukannya akuntansi bagi pemerintahan desa<sup>9</sup>.

Akuntansi desa ini dapat diartikan sebagai suatu pencatatan dari proses transaksi yang terjadi di desa, yang dibuktikan dengan nota-nota untuk kemudian melakukan pencatatan dan pelaporan keuangan yang menghasilkan informasi dalam bentuk laporan keuangan yang digunakan oleh pihak-pihak yang berhubungan. Sehingga akuntansi desa menjadi seperangkat sistem dan kebijakan akuntansi yang memberikan kemudahan bagi pemerintah desa dalam mengelola keuangannya sebagai pengelola dana publik yang diberikan oleh masyarakat.

Undang-undang yang baru saja dikeluarkan tentang desa pada tahun 2014 yaitu, undang-undang nomor 6 tahun 2014. Dimana dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa desa nantinya pada tahun 2015 akan mendapatkan kucuran dan sebesar 10% dari APBN. Akan tetapi jumlah nominal yang diberikan kepada masing-masing desa berbeda tergantung dari geografis desa, jumlah penduduk, dan angka kematian. Alokasi APBN yang sebesar 10% tadi, saat diterima oleh desa akan menyebabkan penerimaan desa meningkat.<sup>10</sup>

Dalam pengelolaan keuangan desa memiliki asas dan prinsip untuk setiap tindakan pengelolaan keuangan desa agar tidak ada penyelewengan dan kesalahan dalam mengelola keuangan desa tersebut. Sesuai dengan

---

<sup>9</sup> Henny Indarriyanti dan Vivi Eka Setyawati, *Akuntabilitas APBDes Sebagai Penentu Tingkat Kredibilitas Aparatur Desa*, (ISBN : 978-602-5617-01-0, 2017), hal. 24

<sup>10</sup> V. Wiratna Sujarweni, *Akuntansi Sektor Publik...*, hal. 121

permendagri nomor 113 tahun 2014, keuangan desa sudah dikelola berdasarkan asas-asas berikut :

a. Transparansi

Yaitu prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat mengetahui dan mendapat akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa. Keterbukaan dalam arti segala kegiatan dan informasi terkait pengelolaan keuangan desa dapat diketahui dan diawasi oleh pihak lain yang berwenang tidak ada sesuatu yang ditutupi atau dirahasiakan. Dengan demikian asas transparansi menjamin hak semua pihak untuk mengetahui seluruh proses dalam setiap tahapan serta serta menjamin akses semua pihak terhadap informasi terkait pengelolaan keuangan desa.

b. Akuntabel

Akuntabel merupakan perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayai dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Akuntabel mempunyai pengertian bahwa setiap tindakan atau kinerja pemerintah atau lembaga dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak yang berkepentingan atau jika dalam pemerintah desa mempunyai rasa tanggungjawab kepada masyarakat desa, supaya terciptanya laporan keuangan desa yang sehat dan sesuai peraturan pemerintah.

## **C. Analisis Laporan Keuangan**

### **1. Pengertian Laporan Keuangan**

Pada umumnya laporan keuangan itu terdiri dari neraca dan perhitungan laba rugi serta laporan perubahan modal, dimana neraca menunjukkan jumlah aktiva, hutang dan modal dari suatu perusahaan pada tanggal tertentu. Sedangkan perhitungan laporan laba rugi memperlihatkan hasil-hasil yang telah dicapai oleh perusahaan serta biaya yang terjadi selama periode tertentu, dan perubahan modal menunjukkan sumber dan penggunaan atau alasan-alasan yang menyebabkan perubahan modal perusahaan. Tetapi dalam prakteknya sering diikuti sertakan kelompok lain yang sifatnya membantu untuk memperoleh penjelasan lebih lanjut, misalnya laporan perubahan modal kerja, laporan sumber dan penggunaan kas atau laporan arus kas, laporan sebab-sebab perubahan laba kotor, laporan biaya produksi serta daftar-daftar lainnya.<sup>11</sup>

Dalam prinsip-prinsip akuntansi Indonesia (Ikatan Akuntansi Indonesia, Jakarta 1974) dikatakan bahwa laporan keuangan ialah neraca dan perhitungan laba rugi serta segala keterangan yang dimuat dalam laporan-lampirannya antara lain laporan sumber dan penggunaan dana-dana. Untuk perusahaan besar yang banyak pemegang sahamnya, maka disamping laporan keuangan yang dimaksud di atas sebaiknya ditambahkan keterangan tentang :

---

<sup>11</sup> S. Munawir, *Analisis Laporan Keuangan*, (Yogyakarta: Liberty, 2007), hal 5

- a. Kondisi dan faktor-faktor ekonomi yang mempengaruhi.
- b. Usaha-usaha yang lalu, sekarang maupun yang akan datang.
- c. Luasnya produksi.
- d. Kebijakan-kebijaksanaan perusahaan.
- e. Penelitian dan pengembangan.
- f. Marketing dan advertising.
- g. Rencana dalam belanja modal dan pembelajaan dimasa yang akan datang.
- h. Kebijakan mengenai deviden dan sebagainya.

Laporan keuangan dipersiapkan dengan maksud untuk memberikan gambaran laporan kemajuan (*progress report*) secara periodik yang dilakukan pihak manajemen yang bersangkutan. Jadi laporan keuangan adalah bersifat historis serta menyeluruh dan sebagai suatu *progress report* laporan keuangan terdiri dari data-data yang merupakan hasil dari suatu kombinasi antara; fakta yang telah dicatat (*recorded fact*), prinsip dan kebiasaan di dalam akuntansi (*accounting convention dan postulate*), dan pendapat pribadi (*personal judgment*).

## **2. Bentuk-Bentuk Laporan Keuangan**

- a. Neraca

Neraca adalah laporan yang sistematis tentang aktiva, hutang serta modal dari suatu perusahaan pada suatu saat tertentu. Jadi tujuan neraca adalah untuk menunjukkan posisi keuangan suatu perusahaan pada suatu tanggal tertentu, biasanya pada waktu tutup buku dan

ditentukan sisanya pada suatu akhir tahun fiskal atau tahun kalender, sehingga neraca sering disebut dengan *balance sheet*. Dengan demikian neraca terdiri dari tiga bagian utama yaitu aktiva, hutang dan modal.

#### 1) Aktiva

Dalam pengertian aktiva tidak terbatas pada kekayaan perusahaan yang berwujud, tetapi juga termasuk pengeluaran yang belum dialokasikan atau biaya yang masih harus dialokasikan pada penghasilan yang akan datang, serta aktiva yang tidak terwujud lainnya misalnya *goodwill*, hak paten, hak menerbitkan dan sebagainya. Pada dasarnya aktiva dapat diklasifikasikan menjadi dua bagian yaitu aktiva lancar dan aktiva tidak lancar.

Aktiva lancar adalah uang kas dan aktiva lainnya yang dapat diharapkan untuk dicairkan mejadi uang tunai, dijual atau dikosumer dalam periode berikutnya. Yang termasuk kelompok yang ada di dalam aktiva lancar yaitu, kas, investasi jangka pendek, piutang wesel, piutang dagang, persediaan, piutang penghasilan, biaya yang dibayar dimuka.

Sedangkan aktiva tidak lancar adalah aktiva yang mempunyai umur kegunaan relatif permanen atau jangka panjang. Yang termasuk dalam aktiva tidak lancar yaitu, investasi jangka panjang, aktiva tetap, aktiva tetap, aktiva tetap tidak berwujud, beban yang ditangguhkan, aktiva lain-lain.

## 2) Hutang

Hutang adalah semua kewajiban keuangan perusahaan kepada pihak lain yang belum terpenuhi, dimana hutang ini merupakan sumber dana atau modal perusahaan yang berasal dari kreditor.

Hutang atau kewajiban perusahaan dapat dibedakan ke dalam hutang lancar (jangka pendek) dan hutang jangka panjang.

Hutang lancar atau hutang jangka pendek adalah kewajiban keuangan perusahaan yang pelunasannya akan dilakukan dalam jangka pendek dengan menggunakan aktiva lancar yang dimiliki oleh perusahaan. Sedangkan hutang jangka panjang adalah kewajiban keuangan yang jangka waktu pembayarannya masih jangka panjang (lebih dari satu tahun sejak tanggal neraca) yang meliputi hutang obligasi, hutang hipotik dan hutang jangka panjang lainnya.

## 3) Modal

Modal merupakan hak atau bagian yang dimiliki oleh perusahaan yang ditunjukkan dalam pos modal, surplus dan laba yang ditahan.

Dalam praktek kadang-kadang nampak adanya suatu klasifikasi di dalam neraca yang pada umumnya membingungkan pembaca, seharusnya cadangan ini diklasifikasikan sesuai dengan klasifikasi neraca yaitu aktiva, hutang dan milik sendiri (modal) sehingga cadangan pada prinsipnya juga terdiri dari 3 golongan yaitu,

cadangan sebagai pengaruh aktiva, cadangan sebagai hutang, cadangan yang merupakan surplus.

b. Laporan Laba/Rugi

Seperti diketahui laporan laba/rugi merupakan suatu laporan yang sistematis tentang penghasilan, biaya, laba/rugi yang diperoleh suatu perusahaan selama periode tertentu. Walaupun belum ada keseragaman tentang susunan laporan laba/rugi bagi tiap perusahaan, namun prinsip-prinsip yang umumnya diterapkan adalah sebagai berikut :

- 1) Menunjukkan penghasilan yang diperbolehkan dari usaha pokok perusahaan diikuti dengan harga pokok dari barang yang dijual sehingga diperoleh laba kotor.
- 2) Menunjukkan biaya operasional yang terdiri dari biaya penjualan dan biaya umum atau administrasi.
- 3) Menunjukkan hasil-hasil yang diperoleh diluar operasi pokok perusahaan.
- 4) Menunjukkan laba/rugi yang *incidental*, sehingga akhirnya diperoleh laba bersih sebelum pajak pendapatan.

**D. Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) No.1 Tahun 2019**

Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) nomor 1 tahun 2019 yaitu tentang penyajian laporan keuangan pemerintah, tujuan pernyataan standar ini adalah mengatur penyajian laporan keuangan untuk tujuan umum dalam rangka

meningkatkan keterbandingan laporan keuangan baik terhadap anggaran, antara periode, maupun antara entitas. Yang dimaksud dengan laporan keuangan untuk tujuan umum adalah sebagai untuk memenuhi kebutuhan pengguna yaitu masyarakat, lembaga legislative, pemeriksa/pengawas, pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, pinjaman dan pemerintah. Untuk mencapai tujuan tersebut standar ini menetapkan seluruh pertimbangan dalam rangka penyajian laporan keuangan, pedoman struktur laporan keuangan, dan persyaratan minimum isi laporan keuangan. Laporan keuangan ini disusun dengan menggunakan basis akrual.<sup>12</sup> Entitas pelaporan menyelenggarakan akuntansi dan penyajian laporan keuangan dengan menggunakan basis akrual yang baik dalam menyajikan laporan realisasi anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undang tentang anggaran.

Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh sesuatu entitas pelaporan. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Untuk memenuhi tujuan umum ini, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai entitas laporan dalam hal, asset, kewajiban,

---

<sup>12</sup> Komite Standar Akuntansi Pemerintah, dalam <https://www.ksap.org/sap/standar-akuntansi-pemerintahan/>, diakses pada tanggal 01 April 2020, hal. 39

ekuitas, pendapatan-LRA, belanja, transfer, pembiayaan, saldo anggaran lebih, pendapatan-LO, beban dan arus kas.

Komponen-komponen yang terdapat dalam satu set laporan keuangan terdiri dari laporan pelaksanaan anggaran (*Anggaranary Reports*) dan laporan finansial, sehingga seluruh komponen menjadi sebagai berikut :

1. Laporan Realisasi Anggaran.
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih.
3. Neraca.
4. Laporan Operasional.
5. Laporan Arus Kas.
6. Laporan Perubahan Ekuitas.
7. Catatan atas Laporan Keuangan.

Komponen-komponen laporan keuangan tersebut disajikan oleh setiap entitas pelaporan, kecuali laporan arus kas yang hanya disajikan oleh entitas yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum dan laporan perubahan saldo anggaran lebih yang hanya disajikan oleh bendahara umum Negara dan entitas pelaporan yang menyusun laporan keuangan konsolidasinya.

## **E. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)**

### **1. Pengertian Desa**

Desa menurut undang-undang No. 6 Tahun 2014, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat

setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan tidak hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)<sup>13</sup>.

Dengan diberlakukannya undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, maka yang menjadi perhatian kita bersama adalah bagaimana selanjutnya pemerintahan desa mengelola, melaporkan dan bertanggungjawab atas keuangan desa tersebut. Desa yang lebih berperan aktif untuk memajukan suatu daerah atau negara dengan program pemerintah yang berkesinambungan langsung oleh daerah atau negara tersebut.

Dalam aspek sosial kemasyarakatan, desa merupakan suatu komunitas kecil yang menetap di suatu tempat. Masyarakat desa memiliki karakteristik sebagai berikut : 1) Peran terbesar dari kelompok primer, 2) Pembentukan kelompok masyarakat sangat ditentukan dengan faktor geografik, 3) Hubungan bersifat intim dan awet, 4) setruktur masyarakat bersifat homogeny, 5) tingkat mobilitas sosial rendah, 6) fungsi kekeluargaan lebih ditekankan sebagai unit ekonomi, 7) prporisi jumlah anak cukup besar dalam struktur kependudukan.<sup>14</sup>

Sedangkan dalam aspek geografis, desa merupakan unti-unit pemusatan penduduk yang bercorak agraris dan terletak jauh dari kota.

Desa dalam definisi tersebut tersirat 3 unsur yaitu wilayah, penduduk dan

---

<sup>13</sup> Laily Faradhiba dan Nur Diana, *Akuntabilitas Pemerintahan Desa dalam Pengelolaan Anggaran, Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Studi Kasus di Desa Banjarsari Kecamatan Bandarkedungmulyo-Jombang*, (E-JRA Vol. 07 No. 07, 2018), hal. 3

<sup>14</sup> Gunawan Prayitno dan Aris Subagio, *Membangun Desa Merencanakan Desa dengan Pendekatan Partisipatif dan Berkelanjutan*, ( Malang : UB Press, 2018 ), hal. 4

tata kehidupan. Ketiga unsur tersebut merupakan suatu kesatuan. Berikut penjelasan masing-masing ketiga unsur tersebut :

1. Wilayah, dalam arti tanah yang produktif dan yang tidak serta penggunaannya termasuk juga unsur lokasi, luas, batas yang merupakan lingkungan geografis setempat.
2. Penduduk adalah hal yang meliputi jumlah, persebaran, kepadatan, pertambahan dan mata pencarian penduduk setempat.
3. Tata kehidupan, ikatan-ikatan pergaulan warga desa dan pola tata pergaulan. Sehingga menyangkut tentang kehidupan masyarakat desa.

Secara geografis tiga aspek tersebut dapat dilihat perwujudan geografisnya berdasarkan unsur fisiografi, ekonomi, politik dan kultur. Faktor penting lainnya adalah letak atau posisi desa terhadap kota atau pusat pertumbuhan lainnya yang turut mempengaruhi peluang perkembangan desa. Perwujudan geografi desa dapat dijadikan dasar untuk menyusun tipologi wilayah perdesaan dan pola pengembangannya.

## 2. **Pengertian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa**

Seperti yang sudah dijelaskan secara singkat pada penegasan istilah bahwa APBDes merupakan suatu rencana keuangan tahunan desa yang ditetapkan berdasarkan peraturan desa yang mengandung prakiraan sumber pendapatan dan belanja untuk mendukung kebutuhan program pembangunan desa yang bersangkutan<sup>15</sup>. Dengan demikian adanya APBDes desa dapat menentukan strategi serta mengukur pengeluaran

---

<sup>15</sup> Elgia Astuty, Eva Hany Fanida, *Akuntabilitas Pemerintahan Desa Dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)*, (Jurnal Mahasiswa Unesa, Vol.1 No.2, 2013), hal. 6

keuangan desa untuk menjalankan program-program yang disusun oleh aparat desa, tidak hanya itu APBDes juga dapat membantu menghitung pendapatan desa.

Salah satu sumber pendapatan desa yaitu berupa dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang sudah dianggarkan 10% dari APBD, bahwa dalam rangka meningkatkan pemberdayaan, kesejahteraan dan pemerataan pembangunan dipedesaan melalui dana APBD kabupaten, provinsi dan pemerintah (nasional), maka perlu direalisasikan dalam APBD masing-masing sebesar 10% untuk alokasi dana desa.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) merupakan dokumen formal hasil kesepakatan antara pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa yang berisi tentang pendapatan dan belanja yang ditetapkan untuk melaksanakan kegiatan pemerintahan desa selama 1 (satu) tahun dan sumber pendapatan yang diharapkan untuk menutup semua keperluan belanja tersebut atau pembiayaan yang diperlukan bila diperkirakan akan terjadi defisit atau surplus. APBDes disusun dengan memerhatikan RPMJDes, RKPDes dan APBDes tahun sebelumnya. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa adalah instrumen penting dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dalam pengelolaan pemerintah desa. Tata kelola pemerintah yang baik dapat dilihat dari proses penyusunan, pelaksanaan, dan pertanggung jawaban APBDes. Aparatur desa wajib memahami tahapan atau siklus

pengelolaan APBDes yang baik, karena ini akan memberikan arti terhadap model penyelenggaraan pemerintah itu sendiri.<sup>16</sup>

Pengelolaan APBDes didasarkan pada prinsip partisipasi, transparansi dan akuntabilitas serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran, sehingga akan mendorong dan memastikan bahwa desa akan dikelola dengan baik.

### **3. Fungsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa**

#### **a. Fungsi Otoritas**

APBDes menjadi target fiscal yang menggambarkan keseimbangan antara pendapatan, belanja dan pembiayaan yang diinginkan sebagai dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja desa pada tahun yang bersangkutan.

#### **b. Fungsi Perencanaan**

APBDes merupakan pernyataan kebijakan public sebagai pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun berikutnya.

#### **c. Fungsi Pengawasan**

APBDes menjadi pedoman pengendalian yang memiliki kosekuensi hukum untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaran pemerintah desa sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.

#### **d. Fungsi Alokasi**

---

<sup>16</sup> Siswadi Sululing, *Akuntansi Desa Teori dan Praktek*, (Purwokerto : CV IRDH, 2018), hal. 37

APBDes harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektifitas perekonomian desa.

e. Fungsi Distribusi

Kebijakan APBDes harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan masyarakat.

f. Fungsi Akuntabilitas

APBDes memberikan landasan penilaian kinerja pemerintah desa, hasil pelaksanaan anggaran yang dituangkan dalam laporan keuangan pemerintah desa sebagai pernyataan pertanggungjawaban pemerintah desa kepada publik.

**4. Manfaat Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa**

Disamping fungsi-fungsi tersebut di atas, anggaran desa juga disusun mempunyai dasar tujuan untuk memenuhi pembiayaan pembangunan dan sumber-sumber dananya untuk pembangunan desa. Secara rinci manfaat penyusunan anggaran desa sebagai berikut :

- a. Sebagai panduan bagi pemerintah desa dalam menentukan strategi kegiatan operasional, dengan melihat kebutuhan dan ketersediaan sumber daya.
- b. Sebagai salah satu indikator untuk menentukan besarnya biaya pelayanan yang akan dibebankan masyarakat.
- c. Bahan pertimbangan untuk menggali sumber pendapatan lain seperti mengajukan pinjaman.

- d. Memberikan kewenangan pada pemerintah desa dalam penyelenggaraan administrasi desa.
- e. Memberi arahan bagi pemerintahan desa dalam penyelenggaraan dan pengawasan pemerintahan desa.
- f. Menggambarkan kebijakan pembangunan desa dalam periode anggaran
- g. Melalui perencanaan yang matang dapat meningkatkan pelayanan masyarakat.

#### **F. Hasil Penelitian Terdahulu**

Untuk memperjelas dan menegaskan pada penelitian ini ada penelitian terdahulu yang mempunyai kesamaan terkait tentang penerapan system akuntansi desa dalam pengelolaan APBDes antara lain :

Kenny Larony dkk,<sup>17</sup>. Tujuan pada penelitian ini untuk mengetahui penerapan sistem akuntansi dan prosedur pengelolaan dana desa. Metode penelitian ini menggunakan jenis pendekatan kualitatif yang disajikan secara deskriptif atau dalam bentuk uraian. Hasil penelitian ini ada penerapan system dan prosedur akuntansi untuk penerimaan kas sudah sesuai dengan tahapan yang semestinya, dimana bendahara desa menerima pendapatan dan dicatat dalam buku bank. Namun sering juga terjadi kendala, akan tetapi bukan disebabkan oleh internal desa, melainkan juga disebabkan oleh tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi maupun pemerintah pusat. Persamaan

---

<sup>17</sup> Kenny Larony Tangkaroro dkk, *Penerapan Sistem dan Prosedur Akuntansi Pengelolaan Dana Desa di Desa Tincep kecamatan Sonder Kabupaten Minahasa*, (Jurnal riset akuntansi Going Concern 12(2), 2017), hal. 8

penelitian ini sama-sama mendiskripsikan penerapan akuntansi dalam laporan keuangan desa. Perbedaannya pada jenis laporan keuangan dan tujuan penelitian.

Suci Indah Hanifah dan Sugeng Praptoyo.<sup>18</sup> Tujuan penelitian ini mengetahui bagaimana penerapan akuntansi dan manajemen keuangan serta hambatan dan upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan pencatatan akuntansi dan manajemen keuangan. Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Hasil penelitian bahwa proses pencatatan akuntansi di Desa Kepatihan Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik telah dilaksanakan, tetapi belum berjalan dengan baik dan belum sesuai dengan Undang-Undang No. 6 tahun 2014, karena pada proses pencatatan akuntansi setiap transaksi-transaksi yang dilakukan hanya dicatat ke dalam buku kas harian dan belum menyusun buku kas umum, hal ini disebabkan terbatasnya sumber daya manusia yang berkompeten dalam bidang akuntansi sehingga pencatatan akuntansi di Desa Kepatihan belum berjalan secara maksimal. Persamaan penelitian ini sama mendiskripsikan penerapan akuntansi dalam mengenai APBDes.

Henny Indarriyanti dan Vivi Eka Setyawanti.<sup>19</sup> Tujuan penelitian ini sejauh mana penerapan akuntabilitas APBDes mampu meningkatkan tingkat kredibilitas yang dimiliki aparatur desa. Metode yang digunakan pada penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian

---

<sup>18</sup> Suci Indah Hanifah dan Sugeng Praptoyo, *Akuntabilitas dan Transparansi Pertanggungjawaban APBDes*, jurnal ilmu dan riset akuntansi Vol. 4 No. 8, 2015, hal. 14

<sup>19</sup> Henny Indarriyanti dan Vivi Eka Setyawati, *Akuntabilitas APBDes Sebagai Penentu Tingkat Kredibilitas Aparatur Desa..*, hal. 11

ini adalah akuntabilitas pada APBDes yang dilakukan oleh aparaturnya Desa Mandesari mampu menunjukkan tingkat kredibilitas yang dimiliki oleh setiap masing-masing individu yang bertanggungjawab atas pencapaian tujuan pemerintah. Hal ini dengan mendasarkan pada pengelolaan keuangan yang telah dilaksanakan aparaturnya desa dengan menerapkan prinsip pengelolaan keuangan desa yang meliputi akuntabel, transparan partisipatif, serta tertib dan disiplin anggaran sebagai indikator yang dapat dinilai. Persamaan, objek yang diteliti adalah laporan keuangan desa yaitu APBDes. Perbedaan tujuan yang dideskripsikan berbeda

Rento Murni Sari.<sup>20</sup> Tujuan penelitian ini adalah penulis ingin mendeskripsikan bagaimanakah akuntabilitas pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) khususnya Dana Desa (DD) di Desa Bendosari Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung. Metode yang digunakan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian adalah Perencanaan program Dana Desa (DD) di Desa Bendosari secara bertahap telah melaksanakan prinsip-prinsip akuntabilitas dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan adanya Musyawarah Desa (MusDes) yang merupakan wujud partisipasi masyarakat hingga tingkat desa. Didukung dengan adanya komitmen yang kuat dari pemerintah Desa Bendosari dalam pelaksanaannya. Selain itu Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2015 yang menjadi acuan dalam perencanaan DD sudah diterapkan dengan baik. Pelaksanaan program Dana Des (DD) di Desa Bendosari telah menerapkan prinsip-prinsip akuntabilitas berupa komitmen,

---

<sup>20</sup> Retno Murni Sari, *Akuntabilitas pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di desa Bendosari kecamatan Ngantru kabupaten Tulungagung...*, hal. 12

sistem aturan, tujuan sasaran, visi misi, hasil,serta sasaran, kejujuran, objektivitas, transparansi, dan inovasi. Walaupun penerapan prinsip akuntabilitas pada tahap ini masih terbatas pada pertanggungjawaban administratif, sedangkan secara teknis masih belum sepenuhnya sempurna. Pengawasan yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa dalam dana desa di Desa Bendosari secara administratif sudah baik. Terbukti dari Surat Pertanggungjawaban (SPJ) yang dibuat dalam III tahap yang menjadi aturan dalam Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2015. SPJ yang sudah baik dan lengkap menjadi acuan dalam perolehan DD tahun berikutnya. Namun dalam hal pertanggungjawaban secara teknis dalam pengelolaan dana Pembangunan yang sepenuhnya pengadaan barang dan jasa tidak dilakukan oleh TPK serta penentuan alokasi yang masih belum merupakan keinginan sepenuhnya dari masyarakat. Sehingga masih memerlukan perbaikan secara teknis dalam pengelolaan DD untuk tahun berikutnya. Persamaan penelitian ini sasaran yang dituju adalah APBDes. Perbedaan tujuan yang didiskripsikan berbeda.

Hadi Prabowo Gimon,<sup>21</sup> Tujuan penelitia ini untuk menganalisa memadai tidaknya system akuntansi pelaksanaan APBDes yang dilaksanaka oleh pemerintahan Desa Kopandakan 1. Metode yang digunakan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian, pengendalian internal dalam hal menghasilkan bukti transaksi yang dilaksanakan pemerintah Desa Kopandakan 1 sudah berjalan dengan cukup baik. Sistem akuntansi pelaksanaan APBDes yang di selenggarakan di Desa Kopandakan 1 Kecamatan Kotamobagu Selatan Kota

---

<sup>21</sup> Hadi Prabowo Gimon, dkk, *Analisis sistem akuntansi pelaksanaan APBDes pada pemerintah desa Kopandakan I kecamatan Kotamobagu selatan kota Kotamobagu...*, hal. 9

Kotamobagu telah sesuai dengan petunjuk pelaksanaan bimbingan dan konsultasi pengelolaan keuangan desa dan permendagri No. 113 Tahun 2014 namun, aparat Desa Kopandakan 1 terkadang mempunyai masalah dalam proses pelaksanaan APBDes dalam hal pemotongan pajak kegiatan dikarenakan minimnya pengetahuan tentang perpajakan dan tingkat pendidikan aparat desa Kopandakan 1 tergolong rendah, hanya beberapa orang saja yang berpendidikan tinggi. Persamaan penelitian ini sasaran yang dituju adalah APBDes. Perbedaan tujuan yang didiskripsikan berbeda.

Inten meutia dan Liliana.<sup>22</sup> Tujuan penelitian ini untuk mengetahui implementasi pengelolaan keuangan dana desa di kabupaten Ogan Ilir Sumatera Selatan. Metode yang digunakan deskripsi kuantitatif dan kualitatif. Hasil penelitian, pelaksanaan pengelolaan keuangan telah sesuai dengan apa yang diatur dalam permendagri nomor 113/2014. Pedoma pengelolaan keuangan desa yang meliputi tahap mulai perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban sampai pengawasan telah dilaksanakan dan semakin banyak desa yang mampu serta patuh terhadap penyusunan system keuangan desa tersebut. Persamaan objek penelitian sama yaitu tentang keuangan desa. Perbedaan metode yang digunakan ada dua yaitu kuantitatif dan kualitatif.

Ismail, Ari kuncoro, Agus.<sup>23</sup> Tujuan penelitian ini mengidentifikasi permasalahan yang dialami desa terkait pengelolaan dana desa. Metode

---

<sup>22</sup> Inten meutia dan Liliana, *Pengelolaan keuangan*, (Jurnal akuntansi multiparadigma, Vol 8 No. 2, 2017) hal. 10

<sup>23</sup> Muhamad ismail dkk, *Sistem akuntansi pengelolaan dana desa*, (Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Vol. 19 No. 2, 2016), hal 11

penelitian ini adalah kualitatif dengan studi kasus. Hasil penelitian, para aparat desa memang belum siap dalam pelaksanaan Undang-Undang 6/2014 karena belum paham sepenuhnya tentang pengelolaan dana desa berdasarkan permendagri 113/2014. Hal tersebut diperparah lagi dengan rendahnya kualitas sumber daya manusia, dikarenakan minimnya sosialisasi. Persamaan objek penelitian sama yaitu tentang keuangan desa. Perbedaan pembahasan mengenai akuntabilitas keuangan.

Pipit dan Purweni.<sup>24</sup> Tujuan penelitian ini untuk mengetahui proses penyusunan dan akuntabilitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Garon tahun 2016. Metode yang digunakan ini adalah kualitatif deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akuntabilitas hukum dan kejujuran Desa Garon telah berpedoman pada Undang-Undang RI No.06 tahun 2014. Akuntabilitas manajerial, pemerintah Desa Garon telah memenuhi desain kelembagaan berdasarkan peraturan menteri dalam negeri No.114 tahun 2014 serta Undang-Undang RI No.06 tahun 2014. Persamaan objek penelitian sama yaitu tentang keuangan desa APBDes. Perbedaan pembahasan mengenai akuntabilitas keuangan

Febrian F. Albugis.<sup>25</sup> Tujuan penelitian ini untuk mengetahui penerapan system akuntansi keuangan daerah dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas keuangan pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Utara. Metode

---

<sup>24</sup> Pipit Juliana dan Purweni Widhianningrum, *Akuntabilitas anggaran pendapatan dan belanja Desa Garon Kec. Kawedanan Kab. Magetan*. (Madiun: Jurnal Akuntansi dan Pendidikan Vol. 6 No.2, 2017), hal 10

<sup>25</sup> Febrian F. albugis, *Penerapan system akuntansi keuangan daerah dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas keuangan pemerintahan daerah Provinsi Sulawesi Utara*, (Jurnal EMBA Vol. 4 No. 3, 2016) hal.7

yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan metode analisis deskriptif. Hasil penelitian, dengan adanya pencatatan system akuntansi keuangan daerah berdasarkan peremendagri No.64 Tahun 2013 dan peraturan pemerintah No.71 Tahun 2010 tentang pencatatan dan pelaporan keuangan berbasis akrual keuangan menjadi lebih cepat dan transparan. Persamaan objek penelitian sama yaitu tentang keuangan desa APBDes. Perbedaan pembahasan mengenai akuntabilitas keuangan.

Elgia dan Eva.<sup>26</sup> Tujuan penelitian ini adalah mendiskripsikan bagaimana akuntabilitas dari pemerintah desa dalam pengelolaan anggaran Dana Desa (ADD) di Desa Sareng Kec. Geger Kab. Madiun. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian, pelaksanaan prinsip-prinsip akuntabilitas sudah berjalan dengan baik namun masih memiliki beberapa kelemahan. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya Musyawarah Desa (MusDes) yang merupakan wujud partisipasi masyarakat di tingkat desa. Persamaan objek penelitian sama yaitu tentang keuangan desa APBDes. Perbedaan pembahasan mengenai akuntabilitas keuangan.

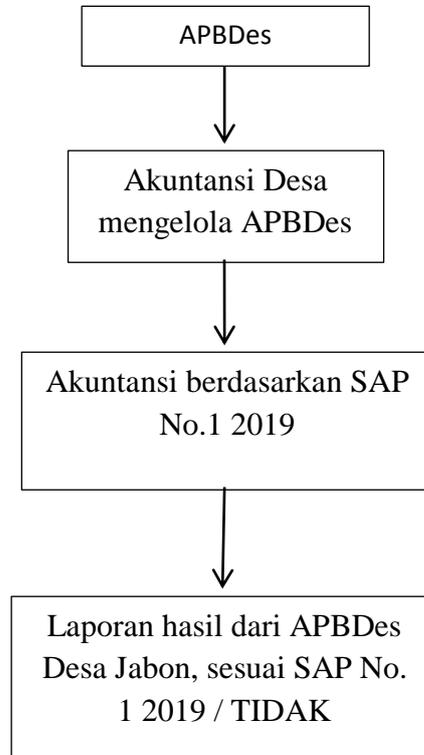
## **G. Kerangka Konseptual**

Pembahasan dalam penelitian ini berdasarkan pada langkah-langkah pemikiran, sebagai berikut:

---

<sup>26</sup> Elgia Astuty dan Eva Hany Fanida, *Akuntabilitas pemerintahan desa dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)*...,hal. 12

**Gambar 2.1**  
**Kerangka Konseptual**



*Sumber : diolah oleh peneliti, tahun 2020*

Penjelasan kerangka konseptual di atas adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa merupakan suatu bentuk susunan keuangan desa yang harus dikelola menggunakan akuntansi pemerintahan desa berdasarkan SAP No.1 2019 tentang penyajian laporan keuangan pemerintah, kemudian laporan hasil pengelolaan tersebut disajikan kepada pihak kepentingan dan masyarakat desa.

